

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2018). *Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-116/PB/2018 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.*
- Kementerian Keuangan. (2012). *Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KM.01/2012 tentang Pembentukan Tim PUG Kementerian Keuangan.*
- Kementerian Keuangan. (2018). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807/KMK.01/2018 tentang Pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Keuangan.*
- Kementerian Keuangan. (2018). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807 tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi PUG di Lingkungan Kementerian Keuangan.*
- Kementerian Keuangan. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan Anggaran dan Pengesahan DIPA.*
- Kementerian Keuangan. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2000). *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan,*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024.*
- Kantor Pelayanan Perbendaraan Negara. (2021). *Keputusan Kepala Kantor KPPN Karawang No: KEP-13/WPB.13/KP.086/2021 tentang Penunjukan Tim Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2021 pada KPPN Karawang.*
- Kantor Pelayanan Perbendaraan Negara. (2021). *Keputusan Kepala Kantor KPPN Karawang No: KEP-12/WPB.13/KP.086/2021 tentang Penunjukan Duta Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2021 pada KPPN Karawang.*

BUKU ATAU SUMBER LAIN

- Fibrianto, A. S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(1).
- Hermawati, W., Luhulima, A. S., & Achmad, S. (2017). Pengembangan Perspektif Gender dalam IPTEK di LIPI: Suatu Memori Kelembagaan. Jakarta: LIPI Press.
- Kementerian Keuangan. (n.d.). *Buku Saku PUG "Pengarusutamaan Gender."*
- Kementerian Keuangan, & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2010). *Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Lingkungan Kementerian Keuangan*. 1–118.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, & Kementerian Perdagangan. (2010). Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Perdagangan. In *Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perdagangan*.
- Kementerian PPA RI. (2013). *Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Daerah*.
- Marzuki. (2007). Kajian Tentang Teori-Teori Gender. In *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* (Vol. 4, Issue 2).
- Mirzaqon, A. (2018). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library. *Jurnal BK UNESA*, 1, 1–8.
- Mita, R. (2015). Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*, 2, 9.
- Murnalungito, D. N. (2016). Diskriminasi Gender terhadap Peserta Didik Perempuan yang Hamil di Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Hukum*, 5(1), 1–11.
- Pajarianto, H., & Umrah, A. S. (2019). Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. In *Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah (LIPPI) Universitas Muhammadiyah Palopo*.
- Poma, M. D., & Tueno, N. S. (2021). Implementasi Program Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, VIII, 105–113.
- Wiasti, N. M. (2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG). *Journal of Anthropology*, 1(1), 29–42.